

**ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT TERHADAP USAHA KECIL:  
STUDI PADA “PD. BPR BKK DEMAK KOTA KANTOR PUSAT  
OPERASIONAL”**

**Oleh:**

**SITI MAHILLANI**

**B12.2010.01523**

**UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemberian kredit usaha kecil pada PD. BPR BKK Demak Kota Kantor Pusat Operasional. Subjek penelitian ini adalah staf karyawan dan pengelola PD. BPR BKK Demak Kota Kantor Pusat Operasional.

Objek penelitiannya adalah analisis prosedur pemberian kredit terhadap usaha kecil studi pada PD. BPR BKK Demak Kota Kantor Pusat Operasional. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit usaha kecil yang ditetapkan oleh PD. BPR BKK Demak Kota Kantor Pusat Operasional telah dilaksanakan dengan baik mulai dari pengajuan permintaan kredit, analisis berkas jaminan, melakukan survey, mempelajari berkas-berkas kredit, sampai dengan pencairan kredit. Selain itu pihak BPR BKK telah melibatkan beberapa bagian antara lain : (1) Pimpinan KPO, (2) Pegawai fungsional, (3) Dewan Direksi, (4) Kuasa Pemutus Kredit (KPK), (5) Notaris, (6) Asuransi (7) Kasir.

**Kata Kunci** : Prosedur, Kredit, Usaha Kecil, BPR

**ABSTRACT**

*This study aimed to analyze the lending procedures of small enterprises in PD. BPR BKK Demak city headquarters. The subjects of this research were staff employees and managers of PD. BPR BKK Demak city Head Office Operations.*

*The object research is analysis of lending procedures small enterprises in PD. BPR BKK Demak city Head Office Operations. Data were collected through interviews and documentation then analyzed with qualitative descriptive analysis.*

*The results showed that the lending procedures of small enterprises established by PD. BPR BKK Demak city Head Office Operations has been good implemented starting from the filing of the demand for credit, analysis of warranties files, conduct surveys, studying the files of credit until the credit disbursement . Besides the BPR BKK has involved several sections, among others: (1) Head of the operational headquarters, (2) functional employee, (3) Board of directors, (4) Authorization for Credit breaker (KPK), (5) Notary , (6) Insurance, and (6) Cashier.*

**Keywords** : Procedures, Credit, Small Enterprises, BPR

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha di era sekarang semakin meningkat seiring dengan perkembangan jaman. Melihat perkembangan dunia usaha yang banyak bermunculan dan tumbuh dengan semakin cepat, hal ini merupakan suatu dampak yaitu ditandai dengan semakin meningkatnya persaingan usaha yang kompetitif. Persaingan merupakan hal yang tidak bisa dihindari lagi apabila sudah berada pada sektor usaha ini. Perusahaan akan melakukan berbagai upaya di segala bidang untuk mencapai perkembangan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat ini. Terlebih pada era globalisasi saat ini perusahaan tidak hanya mengalami persaingan lokal melainkan juga persaingan di tingkat global. Negara-negara yang memiliki jumlah penduduk banyak memiliki tingkat status sosial yang sangat beragam. Kalangan masyarakat menengah ke bawah adalah masyarakat yang paling mendominasi negara-negara yang memiliki jumlah penduduk tinggi.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk yang cukup banyak di dunia. Kondisi ini menyebabkan Indonesia merupakan kawasan pasar yang sangat potensial dalam usaha perkreditan karena di tunjang dengan keadaan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah dan pihak swasta bekerjasama untuk berperan aktif dalam menunjang pembangunan melalui penyaluran kredit kepada masyarakat. Dampak dari kerjasama ini yaitu banyak bermunculan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam pemberian kredit.

Kebutuhan masyarakat yang mendesak seringkali membuat kesulitan dalam penyediaan dana. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lembaga keuangan menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit ini merupakan bisnis utama lembaga keuangan, sehingga aset terbesar lembaga keuangan adalah berupa kredit, begitu halnya dengan pendapatan lembaga keuangan yang sebagian besar berasal dari

pendapatan bunga kredit. Sehingga lembaga keuangan harus bekerja secara professional dan bertanggung jawab dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, termasuk dalam pemberian kredit.

Pemberian kredit (*cash loan*) merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah lembaga bank. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang “perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan“, yang dimaksud dengan kredit adalah menyediakan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Lembaga keuangan (LK) dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang termasuk lembaga keuangan bank adalah bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat (BPR), dan bank campuran. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank yaitu pegadaian, asuransi dan dana pensiun.

Salah satu lembaga keuangan bank adalah bank perkreditan rakyat (BPR) “PD. BPR BKK Kota Demak Kantor Pusat Operasional (KPO)”. BPR menyalurkan kredit kepada usaha Kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar perkreditan dengan pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran. Kredit Usaha Kecil ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu fleksibel dalam menentukan jangka waktu pinjaman, mulai dari 12 bulan, 24 bulan, ataupun 36 bulan. Mengingat persaingan yang terjadi diantara BPR yang ada maka di dalam pelayanan pemberian kredit ini BPR menetapkan suatu prosedur pemberian kredit yang bertujuan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan peminjaman. BPR sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang bergerak di bidang jasa, pemberian kredit

merupakan produk BPR yang menjadi andalan masyarakat sebagai salah satu aktivitas untuk menghasilkan pendapatan utama disamping aktivitas pelayanan BPR lainnya. Produk pemberian kredit ini merupakan salah satu pendapatan utama BPR.

PD. BPR BKK Demak kota Kantor Pusat Operasional memfokuskan pelayanan kepada masyarakat kecil dalam membantu masalah permodalan dalam upaya meningkatkan taraf hidup agar menjadi lebih baik, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan tingkat produksi operasional, dan juga untuk mempertahankan kelangsungan aktivitas usaha calon debitur.

## **2. METODE PENELITIAN**

Rancangan penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Subjek dari penelitian ini adalah staf karyawan dan pengelola PD. BPR BKK Demak Kota Kantor Pusat Operasional. Sedangkan objek penelitiannya adalah data-data prosedur pemberian kredit usaha kecil pada PD. BPR BKK Demak Kota Kantor Pusat Operasional. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif yaitu menguraikan atau menjabarkan prosedur pemberian kredit usaha kecil pada PD. BPR BKK Demak Kota Kantor Pusat Operasional.

## **3. PEMBAHASAN**

Prosedur pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PD. BPR BKK Kota Demak Kantor Pusat Operasional terdiri atas beberapa prosedur yaitu prosedur permohonan kredit, prosedur analisis kredit, prosedur persetujuan permohonan kredit, prosedur pencairan fasilitas kredit, dan prosedur pelunasan fasilitas kredit.

Sistem pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PD. BPR BKK Demak kota Kantor Pusat Operasional tersebut telah didukung oleh penerapan pengendalian internal yang efektif, dan telah memenuhi sistem pengendalaian internal yaitu ada dan

dilaksanakannya prosedur pemberian kredit, lingkungan pengendalian (*control environment*), penafsiran risiko (*risk assessment*) lebih ditingkatkan, aktivitas pengendalian (*control activities*) dan pemantauan (*monitoring*).

Adanya prosedur pemberian kredit yang jelas serta sistem pengendalian internal pemberian kredit yang efektif pada PD. BPR BKK Demak Kota Kantor Pusat Operasional untuk mencapai visi dan misinya, serta menjadi alasan bagi calon debitur memilih PD. BPR BKK Demak untuk memfasilitasi kebutuhan mereka di bidang perkreditan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Anoraga, Pandji, dan Djoko Sudantoko. 2002. *Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. Jakarta. Rineka Cipta.

<http://necel.wordpress.com/2009/06/28/pengertian-prosedur/>. Diakses pada hari Jumat 4 April 2014 Jam 22.00

Hamidi. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. UMM Press. Malang.

Herdiansyah, Haris. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta. Salemba Humanika.

Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.

Khasanah, Imroatul dan Achmad Husaini DKK. 2013. "*Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja dalam upaya Meminimalisir Tunggakan Kredit (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang)*". Universitas Brawijaya.

Latumaerissa, Julius R. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan lain*. Jakarta. Salemba Empat.

- Lubis, Arfandi Ikhsan. 2010. *Akuntansi Keprilakuan*. Edisi kedua. Jakarta. Salemba Empat.
- Muljono. 1996. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*. BPFE. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Edisi ketiga. Jakarta. Salemba Empat.
- Suyatno, Thomas dan H.A Calik DKK. 1990. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta . Gramedia.
- Putra, P Ivand C & I Gusti Ayu Purnamawati. 2013. “*Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan menengah Pada PT. Pegadaian Cabang Singareja*”. Hal 162-172 . Universitas Pendidikan Ganesha.
- Suciati, Cicik. 2013. *Analisis Pengendalian Internal Prosedur Kredit Studi Pada Lembaga Keuangan Islam “Berdikari Insani Mranggen”*. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.
- Susilo, Y Sri dan Sigit Triandaru DKK. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Salemba Empat. Jakarta.
- Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan lain*. Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan.